



RILIS

**KUNKER SPESIFIK KOMISI I DPR RI KE NUSA TENGGARA TIMUR
“TIM KUNKER KOMISI I DPR RI DORONG BAKTI UNTUK MEREALISASIKAN TARGET
PROGRAM USO DAN MENJALIN SINERGITAS DENGAN PEMDA NTT”**

NTT - Di tengah perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) yang cepat, tidak meratanya infrastruktur TIK menjadi persoalan yang dialami negara berkembang, termasuk Indonesia. Kesenjangan infrastruktur telekomunikasi, sangat terasa di Indonesia antara wilayah di perkotaan dan pedesaan. Hal ini juga menjadi fokus di sejumlah negara sehingga muncul Deklarasi Tokyo Tahun 2003, Deklarasi Jenewa Tahun 2003, dan Deklarasi Tunisia Tahun 2005 (*World Summit On Information Society Declaration*) yang bertujuan adanya pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mendukung meratanya penyediaan akses layanan telekomunikasi, baik layanan telepon maupun internet di wilayah perkotaan dan di wilayah pedesaan, khususnya daerah rural yang tidak menguntungkan secara ekonomi, termasuk NTT.

Pelaksanaan Program USO merujuk pada Pasal 16 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Kewajiban penyelenggara jaringan dan/atau penyedia jasa telekomunikasi memberikan kontribusi dalam pelayanan universal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan/atau kompensasi lain. Adapun Kewajiban yang dikenakan kepada penyelenggara telekomunikasi di Indonesia sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi per tahun, yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) mencakup antara lain daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi. Adapun penanggung jawab pengelolaan dana USO, berada di Kemkominfo, yakni Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI).

Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap program tersebut, Komisi I DPR RI melakukan Kunker Spesifik ke NTT guna mengetahui pelaksanaan program USO tersebut. Komisi I DPR RI ingin mengetahui sejauhmana progres penyediaan infrastruktur telekomunikasi (Palapa Ring, Akses Internet, dan BTS) yang diselenggarakan oleh BAKTI. Sebagai ketua Rombongan Kunspek, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

Dalam pertemuan dengan Tim Kunker Spesifik Komisi I DPR RI, Direktur Utama BAKTI Kemkominfo, Anang Latief, menjelaskan mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi (Palapa Ring, Akses Internet, dan BTS) di Nusa Tenggara

Timur. Untuk Palapa Ring, NTT masuk dalam lingkup Palapa Ring Timur yang pengerjaannya tuntas pada akhir tahun 2019. Untuk itu, BAKTI tengah fokus pada utilisasi jaringan yang dibangun melalui program Palapa Ring ke berbagai pihak terkait.

Adapun untuk program akses internet, BAKTI Kemkominfo telah membangun 717 Akses yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di NTT. Sementara itu, BAKTI Kemkominfo telah membangun BTS Site sebanyak 133 BTS dan direncanakan tahun ini akan membangun 195 BTS Site.

Dalam akhir Kunker Spesifik, Tim Kunker Spesifik Komisi I DPR RI mendorong BAKTI, Kemkominfo agar mengoptimalkan utilisasi Palapa Ring Timur dan merealisasikan program penyediaan BTS dan akses internet sesuai target yang telah ditetapkan sehingga masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menikmati layanan telekomunikasi dengan baik. Selain itu, Komisi I DPR RI mendorong BAKTI Kemkominfo untuk terus meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan berbagai pihak untuk optimalisasi utilisasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. (*)

Kupang, 25 Januari 2020
Tim Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke NTT